

# **TEMPLATE PELAPORAN BERSAMA KERANGKA DAYA SAING DAERAH**

0

---

*21 November 2021*

0

# Daftar Isi

## **DAFTAR ISTILAH**

## **KETERLIBATAN MULTIPihak**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **LATAR BELAKANG**

KERANGKA DAYA SAING DAERAH (KDSD)  
PENYELARASAN & KETERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

## **PROSES & METODOLOGI**

PROSES KO-KREASI  
METODOLOGI  
PENCAPAIAN UTAMA/LINI MASA

## **GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN MENUJU KEBERLANJUTAN**

KOMITMEN KABUPATEN TERHADAP PEMBANGUNAN LESTARI  
KEBIJAKAN/PROGRAM INTI

## **PERKEMBANGAN MENUJU KEBERLANJUTAN**

PENCAPAIAN ASPEK PERENCANAAN & PENENTUAN TUJUAN  
PENCAPAIAN ASPEK KETAHANAN EKONOMI  
PENCAPAIAN ASPEK KETAHANAN SOSIAL  
PENCAPAIAN ASPEK SUMBER DAYA LINGKUNGAN & ALAM  
PENCAPAIAN ASPEK INSENTIF  
KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN

## **PELUANG & TANTANGAN**

## **PELAJARAN & REKOMENDASI**

## **REFERENSI**

## **LAMPIRAN**

## **KETERLIBATAN MULTIPihak**

Informasi rinci mengenai para penulis dan pemangku kepentingan/organisasi yang mendukung proses Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) di Kabupaten. Seluruh pihak baik individu maupun lembaga yang terlibat dalam Tim Inti dan Tim Kerja KDSD di Kabupaten akan disebutkan pada bagian ini.

## **LATAR BELAKANG**

*[Informasi dan/atau urgensi skema pelaporan bersama dalam sektor pembangunan lestari]*

### **Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD)**

Informasi singkat mengenai Kerangka Daya Saing Daerah

### **Penyelarasan & Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional**

Informasi singkat mengenai penyelarasan KDSD dengan kebijakan nasional dan ketentuan pelaporan

*[ Informasi terkait keselarasan dengan Kebijakan Satu Data, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pembangunan Rendah Karbon (PRK), pelaporan wajib dari Kementerian Dalam Negeri seperti LPPD, dan kebijakan terkait lainnya dari sektor komoditas atau perkebunan yang berhubungan dengan mekanisme pelaporan]*

## PROSES & METODOLOGI

Sesuai dengan proses KDSD di kabupaten, bagian ini akan menguraikan:

(i) **Proses Ko-Kreasi KDSD** meliputi elemen inti proses implementasi KDSD, contoh: komitmen pemerintah

*[Informasi terkait dengan proses mekanisme pengukuran dampak pembangunan berkelanjutan dalam skema pendekatan yurisdiksi berupa rangkuman dari beberapa inisiatif di tingkat nasional hingga global. Dimulai dari penyusunan alignment, konsultasi publik, persetujuan indikator, finalisasi Mean of Verification (MoV) hingga pendampingan pada kabupaten implementator]*

(ii) **Metodologi:** Proses bagaimana data dikumpulkan, siapa yang terlibat dan bagaimana analisa dilaksanakan

*[Informasi terkait persetujuan pemerintah daerah untuk menerapkan KDSD, pengambilan data baseline, pendampingan dalam penguatan kapasitas tim kerja, melakukan proses pengumpulan data lanjutan, hingga menjadi output 'Laporan Bersama Daya Saing Daerah']*

(iii) **Kejadian Penting / Lini Masa** proses implementasi KDSD (kegiatan atau proses khusus di kabupaten)

*[Informasi terkait kick-off program ini pada masing-masing kabupaten implementor, pembentukan tim inti dan tim kerja, pengambilan data, hingga nantinya akan dilakukan evaluasi]*

## GAMBARAN UMUM PROGRES BERKELANJUTAN

Bagian ini akan berfokus pada ringkasan perkembangan keberlanjutan di kabupaten berdasarkan gambaran umum dari indikator KDSD.

Bagian ini akan mendiskusikan secara singkat ketersediaan data di kabupaten (persentase) berdasarkan kelima aspek KDSD dan visualisasinya.

## **Komitmen Kabupaten terhadap Pembangunan Lestari**

Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai bentuk komitmen daerah terhadap pembangunan lestari.

*[informasi detail mengenai bentuk-bentuk komitmen kabupaten kepada pembangunan lestari; mencakup komitmen yang merupakan arahan dari nasional maupun provinsi, serta komitmen ataupun isu spesifik yang didorong di kabupaten. Pada bagian ini, dapat menggunakan 'Janji & Komitmen' yang sebelumnya telah disampaikan dalam Profil Yurisdiksi, dengan penjelasan lebih jauh mengenai detail program dan dampak yang telah terukur.]*

## **Sorotan Inovasi (sertakan nama kebijakan/program kabupaten)**

Bagian ini akan mendalami suatu kebijakan atau program utama di kabupaten yang sangat berdampak dalam memajukan upaya-upaya keberlanjutan.

*[informasi detail mengenai satu kebijakan/program kunci terkait pembangunan lestari di kabupaten, dengan keterlibatan multipihak dan dampak yang luas. Pada bagian ini, dapat menggunakan 'Sorotan Inovasi' yang sebelumnya telah disampaikan dalam Profil Yurisdiksi, dengan penjelasan lebih jauh mengenai detail program dan dampak yang telah terukur.*

*Contoh: Kabupaten Sintang dapat menampilkan Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari, seperti dalam Profil Yurisdiksi, dengan informasi tambahan terkait perkembangan terkini dan pencapaian utama (mis. integrasi dengan RPJMD, hasil monev, dll.)*

## **PERKEMBANGAN MENUJU KEBERLANJUTAN**

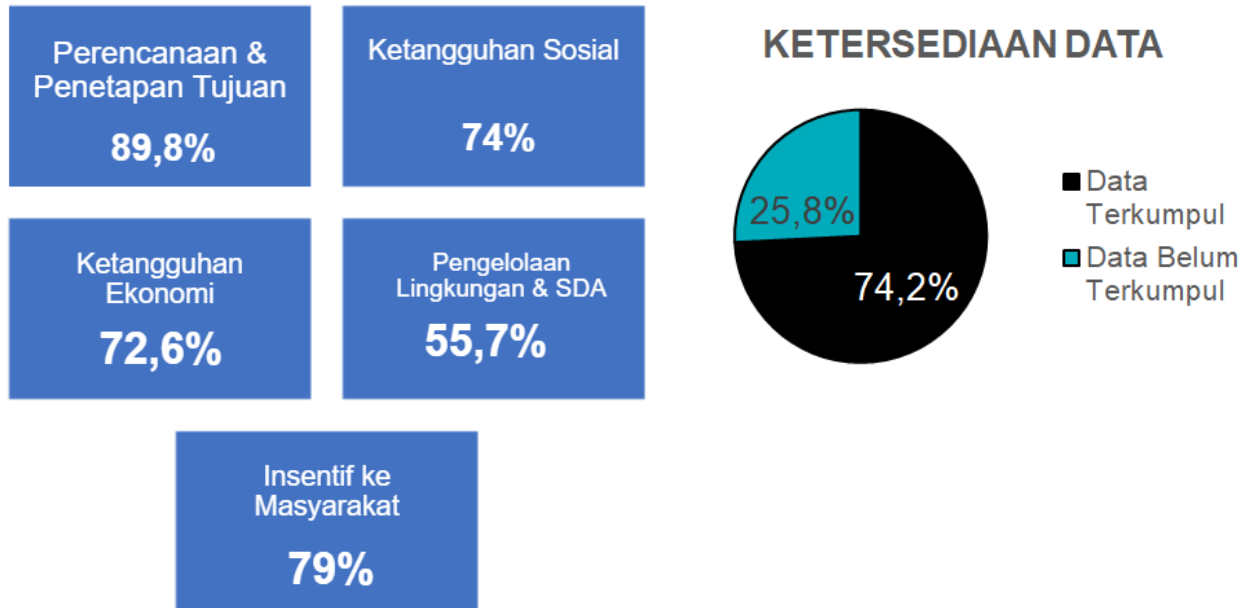
### **Pencapaian**

Bagian ini akan mendalami pencapaian kabupaten untuk masing-masing aspek dalam KDSD:

1. Perencanaan & Penetapan Tujuan
2. Ketangguhan Ekonomi
3. Ketangguhan Sosial
4. Pengelolaan Lingkungan & Sumber Daya Alam
5. Insentif

[Informasi mengenai keseluruhan status pengumpulan data dan rangkuman hasil dari masing-masing indikator:

Contoh:



*Perencanaan & Penetapan Tujuan: 89,8%*

- *RPJMD Kabupaten sudah diinkorporasikan dengan KLHS dan selaras dengan RPJMN / RPJM Provinsi*
- *Kabupaten saat ini telah mensinergikan RPJMD/RPJP dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca. Sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam RAD-GRK adalah sektor kehutanan dan lahan gambut serta pertanian.*
- *Hasil kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan dari 17 Tujuan (Goals), XXX sasaran TPB telah terakomodir dalam RPJMD.*
- *Laporan kemajuan daerah dalam TPB saat ini sudah/belum dilaporkan oleh OPD/Dinas dan lembaga lain di kabupaten.*

## Kolaborasi Multipihak

Bagian ini akan membahas kontribusi dan kolaborasi (kemitraan, program bersama, dll.) berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan perkembangan menuju keberlanjutan di kabupaten. Bagian ini juga akan mendalami forum-forum antar pemangku kepentingan yang ada dan peran mereka di kabupaten.

*[informasi detail mengenai kolaborasi multipihak di kabupaten, termasuk program bersama, pendanaan kolektif, kemitraan, dll. Bagian ini adalah elaborasi lebih lanjut dari bagian 'Intervensi Kunci' di Profil Yurisdiksi, menampilkan informasi yang lebih detail mengenai target dari masing-masing program, progres dan pencapaian terkini, serta pembagian kontribusi para pihak]*

Visualisasi dari bagian 'Intervensi Kunci' dalam Profil Yurisdiksi



1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 3 Dinas Pertanian dan Perkebunan. 4 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP). 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop). 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP). 7 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (DKP). 8 Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 9 WWF Indonesia. 10 Sintang Freshwater Care (SFC). 11 Rainforest Alliance. 12 UNDP-GEF. 13 Forum Komunikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI) Sintang.

## **PELUANG & TANTANGAN**

Bagian ini akan mendalami tantangan dan peluang yang ada guna mempercepat keberlanjutan di kabupaten. Hal ini berhubungan dengan (namun tidak terbatas pada): a. Perkembangan keberlanjutan di yurisdiksi, b. Proses MRV, c. Kolaborasi dan kemitraan, d. Data hilang dan celah data.

*[Contoh:*

*Tantangan:*

- *Belum ada upaya pemasaran yang memadai untuk peluang investasi*

*Peluang:*

- *Regulasi dan forum multipihak yang sudah ada di kabupaten memungkinkan adanya ruang untuk berkolaborasi menuju pembangunan berkelanjutan]*

## **REFERENSI**

Daftar dokumen dan sumber data



## LAMPIRAN

- Daftar ringkasan indikator KDSD

Aspek	Indikator	Sub-Indikator
Aspek Perencanaan dan Penetapan Tujuan	Indikator 1 Rencana pembangunan daerah yang mendukung pemenuhan Tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca	<p>1.1 Kepatuhan penyusunan RPJMD/RPJP Kabupaten berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</p> <p>1.2 . Kepatuhan sinergisitas RPJMD dengan RPJMN, RPJM Propinsi, RPJP Kabupaten dan RKPDes</p> <p>1.3 Kepatuhan penyusunan RPJMD/RPJP Kabupaten untuk mengintegrasikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)</p> <p>1.4 Kepatuhan adopsi RPJMD/RPJP Kabupaten oleh dinas/ badan kunci di dalam Rencana Strategisnya dan Rencana Kerja Tahunannya</p> <p>1.5 . Kepatuhan sinergisitas RPJMD/RPJP Kabupaten dengan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca</p> <p>1.6 Kepatuhan RPJMD/RPJP Kabupaten menjelaskan rencana target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</p>

	<p>Indikator 2</p> <p>Rencana aksi daerah yang mendukung pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca daerah yang mendukung pemenuhan Tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca</p>	<p>2.1 Ketersediaan kebijakan dan/atau rencana ekonomi sesuai Target Pembangunan Berkelanjutan di tingkat kabupaten</p> <p>2.2. Ketersediaan rencana peningkatan kapasitas teknis bagi ASN di dalam pemerintah daerah dalam implementasi visi kabupaten</p> <p>2.3 Standarisasi ramah lingkungan di lingkup pemerintahan dan ruang publik (Standar Pelayanan Masyarakat pada Fasilitas Publik/ SPM-FP)</p> <p>2.4 Ketersediaan mekanisme pengelolaan sampah; meliputi aturan pembatasan penggunaan sampah plastik, pendayagunaan sampah &amp; daur ulang sampah</p> <p>2.5. Ketersediaan rencana mitigasi dan kontigensi bencana utama (kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dsb)</p>
	<p>Indikator 3</p> <p>Rencana tata ruang wilayah yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>3.1. Kepatuhan RTRWK disusun berdasarkan KLHS</p> <p>3.2. Kepatuhan sinergisitas RTRWK dengan RTRW Propinsi, Pulau dan Nasional</p> <p>3.3. Kepatuhan kabupaten menggunakan kebijakan satu peta dalam penataan perizinan pemanfaatan lahan sebagai pelaksanaan RTRWK</p>

		<p>3.4. Ketersediaan informasi geospasial sesuai kebijakan Satu Peta, termasuk pemanfaatan lahan, sebagai panduan pelaksanaan RTRWK</p> <p>3.5. Sinergisitas RTRWK dengan Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK)</p> <p>3.6. Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis untuk kawasan strategis lingkungan sesuai KLHS</p>
	<p>Indikator 4</p> <p>Ketersediaan ruang keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah</p>	<p>4.1. Kepatuhan tata laksana Musrenbang di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten; termasuk keterlibatan aktif Forum masyarakat, mitra pembangunan (CSO), dan pelaku usaha sepanjang proses</p> <p>4.2. Keterwakilan perempuan yang memadai dalam bentuk organisasi formal/informal dalam proses perencanaan pembangunan (contoh : Musrenbang, dll)</p> <p>4.3. Terbentuknya Forum Kelembagaan Multipihak dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai sarana komunikasi</p> <p>4.4. Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/ jasa terintegrasi (e-planning, e budgeting &amp; e-procurement) sesuai ketentuan perundang- undangan dan dapat diakses publik</p>

	<p>Indikator 5</p> <p>Keterbukaan informasi publik dan mekanisme pengaduan terkait</p>	<p>5.1. Kepatuhan pembahasan permasalahan pembangunan dilakukan secara terbuka</p> <p>5.2. Komisi Informasi Kabupaten (Pejabat Penyedia Dokumen) berfungsi dengan baik</p> <p>5.3. Ketersediaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merangkum cascading kinerja seluruh Badan/Dinas dan Kantor di bawah pemerintah Kabupaten</p> <p>5.4. Ketersediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) seluruh Badan/ Dinas dan Kantor di bawah pemerintah kabupaten untuk dapat diakses publik</p> <p>5.5. Ketersediaan aturan, mekanisme dan standar pengaduan masyarakat</p> <p>5.6. Tercapainya target penanganan pengaduan masyarakat</p>
--	--	---

- Penyelarasan dengan masing-masing benchmark (SDGs, RSPO JC, TERPERCAYA, SOURCE-UP, SLRT dan kerangka kerja opsional lainnya, misalnya LandScale, tergantung kepada kabupaten)

No	Variables	Sustainable Landscape Goals	Indicators*   Bold/underlined = Core, Normal = Landscape-dependent, Italic: Optional	Description	KDSD Alignment
1	Ecosystems	1.1 Protect and restore ecosystems	<b>1.1.1 Natural ecosystem protection</b>	How far the natural ecosystem is protected, by law or other effective strategies	KDSD Indicator: 1.3 Compliance in terms of formulation of District RPJMD/RPJP, which integrates Environmental Protection and Management Plan (RPPLH) 15.1 Achieving targeted size of protected areas within Nature Conservation Area (Kawasan Pelestarian Alam/KPA), Nature Reserve Area (Kawasan Suaka Alam/KSA), and Protected Forests (Hutan Lindung/HL), as stipulated by the national government
			<b>1.1.2 Natural ecosystem conversion</b>	Conversion of natural ecosystems to other land uses, disaggregated by land cover type	
			<b>1.1.3 Natural ecosystem degradation</b>	Degradation of natural ecosystems, disaggregated by land cover type	
			1.1.4 Ecosystem restoration	Restoration of degraded ecosystems, disaggregated by restoration type	KDSD Indicator: 15.3 Achieving targeted increase and restoration/rehabilitation of degraded lands and important catchment areas 15.5 Achieving target on the conservation/ restoration efforts of forest, peatland, Essential Ecosystem Area (Kawasan Ekosistem Esensial/KEE) and High Conservation Value (HCV)
			<b>1.1.5 Natural ecosystem connectivity</b>	Connectivity & fragmentation of the natural ecosystem	
			<b>1.2.1 Threatened species</b>	Changes in threats to threatened species	
			<b>1.2.2 Biodiversity habitat conversion</b>	Conversion of natural ecosystems in areas classified as important for biodiversity including Protected Areas (PAs) and Key Biodiversity Areas (KBAs)	KDSD Indicator: 15.1 Achieving targeted size of protected areas within Nature Conservation Area (Kawasan Pelestarian Alam/KPA), Nature Reserve Area (Kawasan Suaka Alam/KSA), and Protected Forests (Hutan Lindung/HL), as stipulated by the national government

- Basis data kabupaten yang dikumpulkan melalui proses KDSD | Bisa diakses berdasarkan permintaan

## KUISIONER KERANGKA DAYA SAING DAERAH

### BAGIAN 1. INFORMASI DASAR / STATISTIK

No	Pertanyaan	Jawaban	Sumber/Referensi	Penyedia Data	Keterangan
1	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten (angka)	Tahun 2018 = 73,73 %	BPS Kabupaten Siak ( <a href="https://siakkab.bps.go.id">https://siakkab.bps.go.id</a> )	Bappeda, BPS	
2	Nilai GINI rasio di Kabupaten (angka)	N/A		BPS	
3	Nilai PDB Kabupaten pertahun (angka)			BPS	
	- PDRB menurut Harga Berlaku (jutaan Rupiah)	Tahun 2018 = Rp.84.673.931	BPS Kabupaten Siak ( <a href="https://siakkab.bps.go.id">https://siakkab.bps.go.id</a> )		
	- PDRB menurut Harga Konstan 2010 (jutaan Rupiah)	Tahun 2018 = Rp.52.615.037			
4	Apa aktivitas utama perekonomian di Kabupaten? (teks / daftar)	Selama 5 tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kab.Siak didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha yaitu: Industri pengolahan, Pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan perdagangan besar dan ecaran, koperasi mobil dan sepeda motor untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada buku Produk Domestik Regional Bruto Kab.Siak menurut lapangan usaha 2014-2018.	BPS Kabupaten Siak ( <a href="https://siakkab.bps.go.id">https://siakkab.bps.go.id</a> )	Sekda - Bagian Perekonomian	Data pendukung belum diunggah